

## **POLITIK ANGGARAN DAN RELASI AKTOR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH**

**Muh. Hamka<sup>1</sup>, Sakinah Nadir<sup>2</sup>, Haryanto<sup>3</sup>**

Universitas Hasanuddin

Email: muhhamka0703@gmail.com<sup>1</sup>, sakinahnadir@unhas.ac.id<sup>2</sup>,  
harymusi@unhas.ac.id<sup>3</sup>

### **Abstrak**

*Penyusunan anggaran daerah melibatkan beberapa aktor yang memiliki kepentingan terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Hubungan setiap aktor membentuk jaringan secara terstruktur dan sistematis serta mengatur strategi demi mengakomodasi kepentingan aktor terhadap APBD. Artikel ini berusaha menjelaskan bagaimana relasi aktor dan politik anggaran membentuk kepentingan dalam penyusunan APBD tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan tipe deskripsi analisis untuk menggambarkan relasi setiap aktor dengan menggunakan teori jaringan aktor dan kebijakan publik. Hasil penelitian menemukan bahwa aktor yang terlibat dalam penyusunan anggaran daerah dikelompokkan menjadi dua yaitu aktor formal dan aktor informal. Aktor utama yang mendominasi penyusunan anggaran daerah adalah kepala daerah sebagai pemegang keputusan tertinggi dan relasi keluarga sebagai aktor informal yang mempunyai pengaruh dalam pengambilan keputusan. Setiap aktor membentuk jaringan untuk mengakomodasi kepentingannya terhadap APBD dengan memperkuat relasinya dengan pemegang keputusan tertinggi dalam penganggaran daerah. Strategi aktor dalam memasukkan dan mengawal kepentingannya terhadap APBD menggunakan empat kerangka strategi politik yaitu strategi posisi, strategi kekuasaan, strategi pemain, dan strategi persepsi. Artikel ini berkontribusi untuk memahami bahwa politik anggaran APBD tidak terlepas peran aktor formal dan aktor informal yang telah membentuk jaringan dalam mengawal kepentingannya masing-masing.*

### **Kata Kunci:**

*Politik Anggaran, Aktor, Relasi Kepentingan, Strategi Politik*

### **Abstract**

*The making of regional budgets involves several actors who have an interest in the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD). The relationship between each actor forms a structured and systematic network and arranges strategies to accommodate the interests of actors in the APBD. This article aims to explain how the relationship between actors and budget politics forms interests in the making of the APBD. The research method used is qualitative with a descriptive analysis type to describe the relationship of each actor by using actor-network theory and public policy. The results of the study found that the actors involved in the making of regional budgets were grouped into two, namely formal actors and informal actors. The main actors who*

*dominate the making of regional budgets are the regional head as the highest decision holder and family relations as informal actors who influence decision making. Each actor forms a network to accommodate their interests in the APBD by strengthening their relationship with the highest decision-makers in regional budgeting. The strategy of actors in entering and guarding their interests in the APBD uses four political strategy frameworks, namely position strategy, power strategy, player strategy, and perception strategy. This article contributes to understanding that APBD budget politics cannot be separated from the role of formal actors and informal actors who have formed networks in guarding their respective interests.*

**Keywords:**

*Budget Politics, Actor, Relationship of Interest, Political Strategy*

**Pendahuluan**

Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sebagai ranah politik anggaran merupakan bagian dari kebijakan publik, sebagai wujud komitmen untuk kepentingan publik. Pada akhirnya APBD merupakan akumulasi kepentingan setiap aktor yang terlibat dalam penyusunannya. Kepentingan setiap aktor berbeda-beda sehingga dapat memunculkan persaingan dan pertentangan. Proses penyusunan APBD merupakan sebuah proses yang cukup rumit dan mengandung muatan politis yang cukup signifikan. Hal tersebut membuat setiap aktor membentuk jaringan dan memerlukan strategi bagi aktor untuk dapat mengakses APBD. Kepentingan beberapa aktor yang berbeda-beda, menambah rumitnya pembagian dan pemenuhan setiap kepentingan aktor. Pada dasarnya lembaga legislatif memperjuangkan konstituen berdasarkan daerah pemilihannya untuk meningkatkan kepercayaan publik, sedangkan eksekutif membiayai segala kebutuhan daerah, aspirasi rakyat dari hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dan visi misi kepala daerah.

Di salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan, proses penyusunan APBD melibatkan aktor politik berdasarkan latar belakang masing-masing aktor. Terkait anggaran daerah, kepala daerah memegang kekuasaan terhadap APBD selain kedudukannya sebagai kepala eksekutif. Di lingkup legislatif dari delapan fraksi – kecuali fraksi Nasdem– menimbulkan hubungan timbal balik berupa pertukaran kepentingan antara aktor yang didukung dengan aktor pendukung. Selain relasi eksekutif dan legislatif, keterbatasan anggaran publik sebagai alokasi sumber daya dapat mempengaruhi persaingan aktor dalam mendominasi anggaran daerah. Anggaran terbatas sementara kepentingan aktor tidak terbatas atau berbanding terbalik.

Dalam dinamika politik anggaran tersebut kadang muncul fenomena *brokerage* di mana kepentingan substantial setiap aktor yang terlibat akan menyisipkan kepentingan terselubung bagi dirinya sendiri maupun pesanan (*by order*) dari aktor eksternal atau informal.<sup>1</sup> Di kabupaten penelitian, setiap program kerja terdapat aktor individu yang memiliki pengaruh besar dalam pengambilan keputusan selain kepala daerah, untuk mengakomodir kepentingan aktor lain terhadap APBD. Hal ini telah menjadi rahasia umum di tengah-tengah masyarakat. Selain itu terdapat fenomena yang menarik di kabupaten penelitian yaitu setiap program kerja atau rencana proyek yang diusulkan oleh aktor formal, maka aktor itu sendiri akan meminta kembali sebagai pelaksana atau yang akan mengerjakan proyek tersebut. Ketika muncul pihak ketiga, juga tidak terlepas dari relasi aktor, di mana terjadi proses permintaan dan pemberian.

Penyusunan anggaran daerah di kabupaten penelitian bukan hanya dipengaruhi oleh aktor formal terdapat juga pengaruh dari aktor informal. Aktor informal juga memiliki kepentingan dalam APBD dengan menggunakan komunikasi politik secara formal dan informal dengan aktor yang memiliki kewenangan secara hukum. Aktor informal yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kelompok kepentingan yang tidak memiliki jabatan di eksekutif maupun legislatif. Kelompok kepentingan tersebut memiliki modal sosial yang kuat dengan relasi atau pendekatan secara sosiologis berdasarkan hubungan kekeluargaan, atau hubungan kerja. Yang lebih menarik di kabupaten penelitian terdapat aktor individu yang memiliki peran kuat dalam menyetujui (disposisi) program kerja aktor lain. Berdasarkan masalah yang dipaparkan tersebut, artikel ini berusaha menjelaskan bagaimana relasi aktor dan politik anggaran membentuk kepentingan dalam penyusunan APBD tersebut.

Beberapa studi terkait aktor politik dalam anggaran khususnya dinamika penyusunan APBD menyebutkan aktor dominan adalah aktor formal.<sup>2</sup> Eksekutif dan legislatif melakukan kolaborasi tertutup atau dapat dianalogikan “pekerjaan bisik-bisik”. Hal ini dipengaruhi karena proses penyusunan APBD tidak melibatkan langsung aktor

---

<sup>1</sup>Rozidateno Putri Hanida, “Dinamika Penyusunan Anggaran Daerah: Kasus Proses Penetapan Program Dan Alokasi Anggaran Belanja Daerah Di Kabupaten Sleman” dalam *Jurnal Penelitian Politik*, Vol 7, No 1 (2010), h. 74.

<sup>2</sup>Herzon Y, “Politik Anggaran: Studi Tentang Proses Perumusan Kebijakan Anggaran Belanja Langsung SKPD dalam Penyusunan APBD Tahun 2011 Di Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi”. *Tesis*. (Yogyakarta: Magister Administrasi Publik, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2011), h. 134; Achmad Nur Fauzi & Dewi Rostyaningsih, “Analisis Peran Aktor Dalam Formulasi Kebijakan Semarang *Smart City*” dalam *Journal Of Public Policy And Management Review*, Vol. 7, No. 4 (2018), h. 1-18.

informal. Ruang konsultasi publik dalam mengakses APBD terbatas karena aktor formal mementingkan konstituen dan popularitasnya dalam menyusun anggaran daerah. Berbagai studi lain juga menjelaskan terkait pentingnya peran aktor di luar aktor formal melalui jaringan informal dalam kebijakan publik.<sup>3</sup> Aktor dalam kebijakan publik dikelompokkan jadi dua yaitu aktor formal dan informal atau aktor negara dan non negara. Setiap aktor memiliki akses yang berbeda sehingga masing-masing aktor membentuk jaringan tertentu. Pemerintah sebagai aktor formal tidak menjadi aktor tunggal atau dominan. Keterlibatan aktor informal berperan penting untuk saling berinteraksi, komunikasi, dan kerjasama demi tercapai tujuan semua aktor berdasarkan harapan dan kepentingan masing-masing.

Penelitian sebelumnya lebih banyak mengkaji dan mengidentifikasi aktor formal yang terlibat dalam penyusunan APBD. Belum menjelaskan relasi setiap aktor dan strategi aktor dalam mengakomodasi kepentingannya terhadap APBD. Maka dalam penelitian ini terdapat aktor informal yang memiliki peran besar dalam penyusunan APBD. Selanjutnya penelitian ini berfokus pada pembentukan jaringan aktor yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dengan strategi dan beberapa pendekatan. Selain itu peneliti menganalisis strategi kelompok kepentingan dalam mengawal kepentingannya terhadap aktor yang memiliki peran dominan dalam dinamika penyusunan anggaran daerah. Selain itu, yang juga menarik dalam objek penelitian ini adalah kekuatan politik antara partai koalisi dan oposisi pemerintah daerah yang seimbang di DPRD, sementara di lingkup eksekutif perbedaan politik dan kepentingan bupati terpilih dengan rival pendukung bupati sebelumnya masih berpengaruh.

### **APBD dalam Perspektif Politik Anggaran**

Seorang pakar politik anggaran, Irene S. Rubin menjelaskan bahwa anggaran merupakan: (1) Anggaran merefleksikan pilihan tentang tindakan pemerintah yang akan dilakukan atau tidak akan dilakukan; (2) Anggaran mencerminkan prioritas pemerintah

---

<sup>3</sup>Taufik, "Studi Jaringan Aktor dalam Perumusan Kebijakan Publik" dalam *AL-IJTIMA'I-International Journal of Government and Social Science*, Vol. 2, No. 2, (2017), h. 219-234; Delly Maulana, "Konflik dan System Nilai dalam Proses Penyusunan Kebijakan Anggaran Pendapatan dan belanja daerah (APBD) di Pemerintahan Daerah Provinsi Banten" dalam *Journal of Indonesia Public Administration and Governance Studie (JIPAGS)*, Vol. 4, No. 1 (2020), h. 707-719.

terhadap individu atau kelompok yang berbeda dengan pemerintah.<sup>4</sup> Sedangkan Robert B. Denhardt dan Janet V. Denhardt menjelaskan bahwa anggaran sebagai kebijakan pemerintah untuk menentukan kepentingan publik dalam bidang ekonomi.<sup>5</sup> Jadi jelaslah bahwa anggaran menjelaskan apa yang pemerintah lakukan dengan mengalokasikan sumber daya terbatas, menyiratkan pilihan di antara berbagai macam pengeluaran yang potensial untuk pelaksanaan program-program yang dibiayai dengan uang publik serta membutuhkan beberapa macam proses pembuatannya.<sup>6</sup>

Politik anggaran dapat dipahami dengan penyelidikan atas pola perilaku dan kewenangan. Hal tersebut merupakan pintu manifestasi dari distribusi kekuasaan para aktor dalam pembuatan kebijakan anggaran. Sehingga dapat dimengerti bahwa tarik-menarik antar aktor-aktor utama dalam penganggaran, tidak terlepas dari keinginan untuk memperbesar pengaruhnya masing-masing, sebagaimana terlihat dari terakomodasinya kepentingan aktor. Untuk memahami proses penyusunan anggaran diperlukan pemahaman tentang;<sup>7</sup> a). Struktur formal peran dan tanggung jawab dalam proses penganggaran, b). Peran Pemerintah dalam pengambilan keputusan, pilihan politik dan akuntabilitas pada sistem manajemen pengeluaran publik, c). Jaringan kekuasaan dan pengaruh stakeholders (di luar proses formal) yang mempengaruhi hasil dari proses anggaran, d). Insentif yang diberikan (baik tersembunyi maupun terang-terangan) atas tindakan yang mempengaruhi politisi dan birokrasi dalam pengambilan keputusan selama penyusunan dan penetapan anggaran, e). Ruang pengambilan keputusan birokrasi pada semua level proses penetapan anggaran.

APBD sebagai politik anggaran untuk merumuskan, menetapkan, hingga menjalankan program kerja yang telah ditentukan kemudian mengevaluasi hasil program kerja tersebut merupakan bagian dari kebijakan publik. APBD dalam perspektif politik anggaran pada kajian ini adalah pengalokasian sumber daya terbatas dalam membiayai program kerja yang telah disusun dalam satu tahun periode anggaran dengan melihat peran dan pola perilaku aktor yang terlibat dalam proses penyusunan

---

<sup>4</sup>Irene S. Rubin, *The Politics Of Public Budgeting: Getting And Spending, Borrowing and Balancing* (Chatham: Chatham House, 2006).

<sup>5</sup>Robert B. Denhardt & Janet V. Denhardt, *Public Administration: An Action Orientation*, 6<sup>th</sup> Ed (USA: Thomson Wadsworth, 2009), h. 238.

<sup>6</sup>Herzon Y, *Op.Cit.*, h. 24.

<sup>7</sup>Andy Norton & Diane Elson, *What's Behind The Budget?: Politics, Right and Accountability In The Budget Process* (London, UK: Overseas Development Institute, 2002), h. 23.

anggaran daerah sehingga dapat membentuk jaringan dan menyusun strategi dalam memasukan kepentingannya terhadap APBD.

### **Aktor dalam Kebijakan Publik**

Charles Lindblom dalam bukunya “*The Policy Making Process*” menjelaskan bahwa untuk mengetahui proses perumusan kebijakan maka perlu mengidentifikasi siapa aktor yang terlibat atau bagaimana peran aktor dalam proses kebijakan tersebut.<sup>8</sup> Aktor dalam kebijakan publik adalah individu maupun kelompok yang pengaruh dan akses terhadap kebijakan tersebut. Hasil dari kebijakan publik berdasarkan kepentingan aktor. Menurut Moore, aktor yang terlibat dalam perumusan kebijakan publik dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu aktor negara, aktor privat dan aktor masyarakat.<sup>9</sup> Secara umum aktor kebijakan juga dapat dikelompokkan menjadi dua berdasarkan peran dan fungsinya yaitu aktor resmi sebagai aktor yang memiliki legalitas formil dan aktor informal selain aktor formal. Aktor formal sebagai pembuat kebijakan dan aktor informal sebagai pemberi dukungan atau tuntutan terhadap aktor formal.

Kebijakan publik dirumuskan oleh aktor berdasarkan tuntutan, dukungan dan kondisi masyarakat. Aktor dalam perumusan kebijakan dapat berupa individu maupun kelompok. Aktor yang memiliki kepentingan terhadap kebijakan harus memiliki akses untuk mempengaruhinya melalui jalur formal maupun informal. Aktor dalam jaringan publik berkaitan dengan jumlah aktor yang terlibat. Berdasarkan jumlah aktor tersebut berpengaruh terhadap besarnya jaringan dan jumlah relasi ke aktor-aktor lain. Jaringan aktor akan membentuk aktor dominan sebagai pusat relasi, relasi satu arah (asimetris) dan relasi dua arah (simetris).

Roberts, Hsiao, Berman dan Reich menjelaskan empat tipologi kerangka strategi politik yang digunakan untuk melihat perilaku aktor mempengaruhi proses perumusan kebijakan, yakni;<sup>10</sup> (1) Strategi posisi menjelaskan tentang posisi aktor yang melibatkan dengan melihat relasi aktor lain melalui lobi, negosiasi, atau tawar menawar kepentingan. Posisi ini berdasarkan tuntutan dan dukungan aktor terhadap kebijakan yang diinginkan. (2) Strategi kekuasaan memanfaatkan relasi kuasa aktor dengan

---

<sup>8</sup>Taufik, *Loc. Cit.*

<sup>9</sup>Achmad Nur Fauzi & Dewi Rostyaningsih, *Loc. Cit.*

<sup>10</sup>Marc Roberts, William Hsiao, Peter Berman & Michael Reich, *Getting Health Reform Right* (Oxford: Oxford University Press, 2002), h. 78.

menggunakan berbagai cara berdasarkan sumber daya yang dimiliki aktor. (3) Strategi pemain melihat aktor memobilisasi aktor lain yang memiliki kekuatan dalam mempengaruhi kebijakan. Biasanya aktor yang dimobilisasi adalah aktor yang kecewa akibat tidak terakomodasinya kepentingan terhadap kebijakan. (4) Strategi persepsi menggunakan informasi untuk berusaha mengubah cara berpikir dan melihat suatu wacana untuk memetakan masalah dan solusinya.

Pada tahap perumusan kebijakan, pemangku kebijakan harus menentukan tujuan dan cara untuk memecahkan masalah serta menentukan alternatif kebijakan terbaik yang dapat diambil.<sup>11</sup> Untuk mencapai tujuan tersebut, perlu adanya keterlibatan antara aktor, melalui jaringan. Jaringan kebijakan memberi kontribusi terhadap perubahan tujuan dengan kemunculan aktor-aktor yang sarat dengan nilai-nilai motivasi dan kepentingan.<sup>12</sup> Konsep jaringan berkaitan dengan aktor yang terlibat langsung dalam membuat kebijakan sebagai aktor formal dan aktor informal seperti masyarakat sipil, media, kelompok kepentingan, kelompok penekan, dan lain-lain. Hubungan antar aktor tersebut bersifat *interdependensi* atau saling ketergantungan

Teori jaringan didasarkan pada asumsi bahwa relasi para aktor itu bersifat saling tergantung satu sama lain (*interdependence*). Secara sederhana dapat dipahami bahwa aktor tidak mampu mencapai tujuannya tanpa menggunakan sumber daya yang dimiliki oleh aktor lain.<sup>13</sup> Asumsi kedua adalah aktor dalam kebijakan publik tidak bersifat tunggal namun plural sehingga terdapat suatu elemen yang heterogen. Setiap aktor memiliki akses yang beragam untuk mendapatkan sumber daya dan memiliki kemampuan untuk berkomunikasi membentuk koalisi dan oposisi. Jaringan akan tercipta melalui pemerintah dan berbagai lapisan yang terdapat di masyarakat sehingga didapatkan kontribusi yang maksimal. Yang terhimpun dalam jaringan bisa terdiri dari individu maupun kelompok yang aktif dan saling mempengaruhi.

---

<sup>11</sup>Luqyana Amanta Pritasari & Bevaola Kusumasari, "Intervensi Aktor Dalam Mempengaruhi Formulasi Kebijakan Lingkungan: Studi Kasus Kebijakan Relokasi Tambak Udang Di Yogyakarta" dalam *Jurnal Borneo Administrator*, Vol. 15, No. 2 (2019), h. 179-198.

<sup>12</sup>Sri Suwitri, "Jejaring Kebijakan Dalam Perumusan Kebijakan Publik (Suatu Kajian Tentang Perumusan Kebijakan Penanggulangan Banjir dan Rob Pemerintah Kota Semarang)" dalam *Jurnal Delegasi STIA Banjarmasin*, Vol. 6 No. 3 (2008), h.1-32.

<sup>13</sup>Pratikno, "Peningkatan Kapasitas Berjejaring Dalam Tata Pemerintahan Yang Demokratis" dalam Wahyudi Kumorotomo & Ambar Widaningrum (ed.), *Reformasi Aparatur Negara Ditinjau Kembali* (Yogyakarta: Gava Media, 2010), h. 114.

Berdasarkan uraian di atas maka dalam penelitian ini teori yang digunakan adalah teori jaringan aktor dari Wellman.<sup>14</sup> Wellman menjelaskan beberapa prinsip terkait jaringan aktor sebagai berikut: (1) Ikatan antara aktor biasanya adalah simetris baik dalam kadar maupun intensitasnya. Aktor saling memasok dengan sesuatu yang berbeda dan mereka berbuat demikian dengan intensitas yang semakin besar atau semakin Kecil. (2) Ikatan antara individu harus dianalisis dalam konteks struktur jaringan lebih luas. (3) Terstrukturnya ikatan sosial menimbulkan berbagai jenis jaringan non-acak. Di Satu pihak, jaringan adalah transitif (*transitive*): bila ada ikatan antara A dan B dan C, ada kemungkinan ada ikatan antara A dan C. Di lain pihak, ada keterbatasan tentang berapa banyak hubungan yang dapat muncul dan seberapa kuat hubungan itu dapat terjadi. Akibatnya adalah ada kemungkinan terbentuknya kelompok-kelompok jaringan dengan batas tertentu, yang saling terpisah satu sama lain. (4) Adanya kelompok jaringan menyebabkan terciptanya hubungan silang antara kelompok jaringan maupun antar individu. (5) Ada ikatan asimetris antara unsur-unsur di dalam sebuah sistem jaringan dengan akibat bahwa sumber daya yang terbatas akan terdistribusikan secara tak merata. (6) Sebagai prinsip. Distribusi yang timpang dari sumber daya yang terbatas itu dengan bekerjasama. Sedangkan kelompok lain bersaing dan memperebutkannya. Jadi teori jaringan berkualitas dinamis dengan struktur sistem akan berubah bersamaan dengan terjadinya pergeseran pola koalisi dan konflik. Jaringan kebijakan memberikan kemungkinan komunikasi antara aktor yang berbeda secara berkelanjutan.

Aktor baik individu maupun kelompok akan berinteraksi satu sama lain dalam perumusan kebijakan publik. Pendekatan jaringan menunjukkan tidak adanya aktor tunggal dalam pembuatan sebuah kebijakan. Distribusi kekuasaan atau alokasi sumber daya dalam relasi aktor bersifat saling tergantung sama lainnya.

### Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan tipe deskripsi analisis untuk menggambarkan relasi setiap aktor dengan menggunakan teori jaringan aktor kebijakan publik dari Wellman.<sup>15</sup> Teknik pengumpulan data yang dilakukan

---

<sup>14</sup>Taufik, *Loc. Cit.*

<sup>15</sup>*Ibid.*

adalah wawancara mendalam terhadap beberapa informan yang terlibat langsung dan memahami proses penyusunan anggaran daerah. Observasi partisipasi dilakukan oleh penulis dengan terjun langsung ke lokasi penelitian untuk mengamati proses penyusunan anggaran daerah. Studi kepustakaan sebagai data sekunder dikumpulkan dengan merujuk pada berita, artikel, jurnal, dan buku. Penelitian ini berlokasi di salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan. Nama kabupaten dan informan dianonimkan.<sup>16</sup>

Data-data penelitian dianalisis menggunakan teknik dari Creswell yakni terdiri dari lima langkah,<sup>17</sup> yaitu: (1) Mempersiapkan dan mengelola data untuk dianalisis, pada tahap ini menggunakan transkrip wawancara, mengumpulkan dan menyusun data. (2) Membaca keseluruhan data untuk menentukan pengertian umum berdasarkan informasi yang diperoleh dan menentukan makna berdasarkan keterangan narasumber. (3) Menganalisis lebih detail dengan menginterpretasikan menggunakan kode tertentu. *Coding* pengkodean merupakan proses pengelolaan materi dengan mengubah materi menjadi kode. (4) Menggunakan *coding* untuk mendeskripsikan tempat, waktu, orang, kategori dan tema tertentu. (5) Mendeskripsikan hasil pengolahan data dalam bentuk deskriptif atau laporan kualitatif.

### **Aktor dalam Penyusunan APBD**

Proses penyusunan APBD kabupaten penelitian melalui pembahasan bersama antara eksekutif sebagai pelaksana dan legislatif sebagai wakil rakyat. Sebelum masuk ke sidang DPRD, pihak eksekutif melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menyusun rancangan program kerja berdasarkan Rancangan Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Kebijakan anggaran disusun oleh beberapa aktor baik aktor formal maupun aktor informal. Menurut Charles Lindblom, untuk memahami siapa sebenarnya yang merumuskan kebijakan lebih dahulu harus dipahami sifat-sifat semua pemeran serta, bagian atau

---

<sup>16</sup>Benjamin Saunders, Jenny Kitzinger & Celia Kitzinger, "Anonymising Interview Data: Challenges And Compromise In Practice" dalam *Qualitative Research*, Vol. 15, No. 5 (2015), h 616-632.

<sup>17</sup>John W. Creswell, *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012).

peran apa yang mereka lakukan, wewenang atau bentuk kekuasaan yang mereka miliki, dan bagaimana mereka saling berhubungan serta saling mengawasi.<sup>18</sup>

Berdasarkan pendapat para ahli, penulis menyimpulkan aktor-aktor dalam kebijakan publik dibagi dua kelompok yaitu aktor formal terdiri atas eksekutif, legislatif, badan administratif dan yudikatif. Sedangkan aktor informal terdiri atas masyarakat, kelompok kepentingan, kelompok penekan, partai politik, media dan individu warga negara. Berdasarkan analisis data dalam penelitian ini, penulis menguraikan aktor yang terlibat langsung dalam penyusunan APBD di kabupaten penelitian, yakni aktor formal: (1) eksekutif, (2) legislatif, dan (3) badan administratif. Sedangkan aktor informal (1) aktor individu dan (2) kelompok kepentingan. Berikut uraian dan analisis tipe dan peran setiap aktor dalam penyusunan anggaran daerah kabupaten penelitian.

#### *Aktor Formal*

Aktor formal menurut Anderson adalah pembuat kebijakan resmi (*official policy-maker*), mereka yang memiliki kewenangan legal untuk terlibat dalam perumusan kebijakan publik. Aktor yang disebutkan oleh Anderson adalah eksekutif, legislatif, badan administratif dan yudikatif. Terkait aktor dalam penyusunan APBD sebagai kebijakan anggaran daerah disusun oleh pemerintahan daerah kabupaten/kota. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang dimaksud dengan pemerintahan daerah adalah pemerintah daerah dan DPRD sebagai penyelenggaraan pemerintahan daerah otonom menurut asas desentralisasi.

Kepala daerah atau bupati merupakan aktor resmi selaku eksekutif yang memiliki peran sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam anggaran daerah yaitu proses penyusunan APBD. Akan tetapi menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pemerintahan daerah bukan hanya kepala daerah saja akan tetapi DPRD selaku lembaga legislatif juga termasuk sebagai penyelenggara pemerintahan daerah. Sehingga dalam penyusunan anggaran daerah, pihak eksekutif menyusun rancangan peraturan daerah tentang APBD kemudian dibahas bersama di lembaga legislatif. Sedangkan aktor formal di OPD sebagai badan administratif yang terlibat dalam penyusunan

---

<sup>18</sup>Herzon Y, *Op. Cit.*, h. 22.

anggaran daerah kabupaten penelitian dapat dilihat berdasarkan tugas, fungsi dan jabatan yang dimilikinya terhadap organisasi atau lembaga daerah.

### *Aktor Informal*

Politik anggaran sebagai kebijakan publik melibatkan banyak aktor. Perumusan kebijakan publik bukan hanya melibatkan aktor formal tetapi terdapat juga keterlibatan aktor informal walaupun tidak terdapat dalam struktur. Anderson menyebut aktor informal juga sebagai aktor non pemerintah (*non governmental participant*). Dalam penyusunan anggaran daerah, aktor informal merupakan orang-orang yang tidak memiliki kewenangan namun memiliki pengaruh dan keterlibatan dalam APBD. Keterlibatan aktor informal berada di balik aktor formal. Beberapa aktor formal yang biasa terlibat dalam proses perumusan kebijakan publik adalah partai politik, kelompok kepentingan, organisasi masyarakat, LSM akademisi, media massa dan sebagainya. Akan tetapi dalam penelitian ini aktor informal yang terlibat dalam penyusunan APBD kabupaten penelitian tahun 2022 yang berhasil diidentifikasi oleh peneliti adalah tim sukses bupati sebagai kelompok kepentingan dan anak bupati sebagai aktor tunggal. Kedua klasifikasi aktor tersebut terlihat jelas dan terlibat langsung dalam proses penyusunan anggaran daerah di kabupaten penelitian.

Berdasarkan latar belakang relasinya, tim sukses sebagai kelompok kepentingan merupakan orang-orang yang telah berjasa dalam memperjuangkan kemenangan bupati terpilih. Kelompok ini telah membantu bupati terpilih dalam hal modal ekonomi dan modal sosial pada kontestasi pemilihan kepala daerah. Sehingga kelompok kepentingan berharap mendapat balasan jasa dari pemegang kekuasaan tertinggi dalam terakomodasinya kepentingan terhadap APBD. Sementara aktor tunggal adalah aktor yang memiliki hubungan kekeluargaan dengan kepala daerah kabupaten penelitian. Dalam lingkup pemerintahan kabupaten penelitian, aktor ini disebut juga dengan istilah "Putra". Istilah ini sering digunakan oleh orang-orang terdekatnya untuk mengklaim dirinya sebagai satu jaringan kepentingan dengan bupati. Berdasarkan uraian aktor formal dan informal di atas maka peran dan fungsi setiap aktor yang telah dijelaskan dapat dilihat pada tabel 1.

Table 1.  
*Aktor dalam Jaringan Kebijakan Publik*

<b>Aktor</b>	<b>Tipe Aktor</b>	<b>Tipe Koordinasi</b>	<b>Peran dan fungsi</b>
Kepala Daerah	Eksekutif	Hierarkis	Pemegang kekuasaan tinggi dalam anggaran daerah
Anggota DPRD	Legislatif	Hierarkis dan <i>overlapping</i> (tumpang tindih)	Fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan
Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	Badan administratif	Konsultatif	Menyusun rancangan peraturan daerah terkait APBD
Anak Bupati	Informal: Aktor individu	Konsultatif	Menyaring kepentingan yang masuk dalam lingkup informal
Tim Sukses Bupati	Informal: Kelompok kepentingan	Konsultatif	Memasukan dan mengawal kepentingan terhadap APBD

*Sumber: Hasil Pengolahan Data oleh Penulis.*

### **Jaringan Aktor dalam Penyusunan APBD**

Teori jaringan didasari dari sebuah asumsi bahwa terdapat suatu elemen yang heterogen. Setiap aktor dipandang memiliki cara dan akses yang beragam dalam mendapatkan sumber daya dan memiliki kemampuan untuk koordinasi, kolaborasi dan menciptakan efek. Jaringan yang terbentuk memiliki sifat jaringan berdasarkan peran aktor dan latar belakangnya. Berdasarkan perspektif Barnes terdapat tiga sifat jaringan sosial, di antaranya adalah jaringan kepentingan, jaringan emosional dan jaringan kekuasaan.<sup>19</sup> Setiap aktor membentuk jaringan berdasarkan peran sebagai akses terhadap kebijakan demi tercapainya tujuan aktor.

Berikut analisa penulis terkait relasi setiap aktor dalam penyusunan anggaran daerah di kabupaten penelitian tahun 2022. *Pertama*, tim sukses sebagai kelompok kepentingan memiliki relasi lebih banyak terhadap unsur-unsur jaringan dalam penyusunan anggaran daerah. Keterlibatan tim sukses dalam penyusunan APBD merupakan tim pendukung pada kontestasi pemilihan bupati. Tim sukses merupakan

<sup>19</sup>Ningrum Danastri & Agus Machfud Fauzi, "Jaringan Sosial Pengusaha Tionghoa di Kota Surabaya" dalam *Paradigma*, Vol. 10, No. 1 (2021), h. 1-20.

individu dan kelompok yang menjadi pengusung secara modal ekonomi dan sosial dalam memenangkan bupati terpilih. Posisi aktor informal dalam APBD adalah sifatnya abstrak atau tidak terlihat secara langsung. Selain kelompok kepentingan melakukan komunikasi langsung, kelompok kepentingan juga menitipkan kepentingannya di anggota DPRD atau di birokrat yang memiliki kewenangan dalam penyusunan anggaran daerah. Tim sukses mengharapkan timbal balik darinya. Hal ini sesuai dengan teori Wellman tentang jaringan aktor bahwa hubungan setiap aktor bersifat simetris. Artinya hubungan kedua aktor bersifat dua arah. Tujuan utama tim sukses adalah dengan terakomodasinya kepentingan terhadap APBD.

*Kedua*, selain hubungan antara kelompok kepentingan terhadap kepala daerah terdapat juga relasi terhadap OPD tertentu sesuai dengan kepentingan tim sukses. Akan tetapi hubungan tersebut harus berdasarkan pertimbangan pemegang keputusan anggaran yaitu kepala daerah dan anak bupati sebagai aktor individu. Contoh kasus hubungan kelompok kepentingan terhadap salah satu OPD yaitu Dinas Pemuda dan Olahraga. Satu-satunya organisasi pemuda yang terakomodir kepentingannya adalah organisasi pemuda A karena di bawah naungan dari keluarga bupati. Dalam RKPD salah satu misi bupati adalah meningkatkan sumber daya manusia. Sehingga anggaran untuk pemuda memang dapat terakomodasi akan tetapi program kerja tersebut menimbulkan persaingan di antara organisasi pemuda lainnya. Sehingga yang dapat terakomodir adalah orang-orang punya modal relasi dengan pemegang kekuasaan.

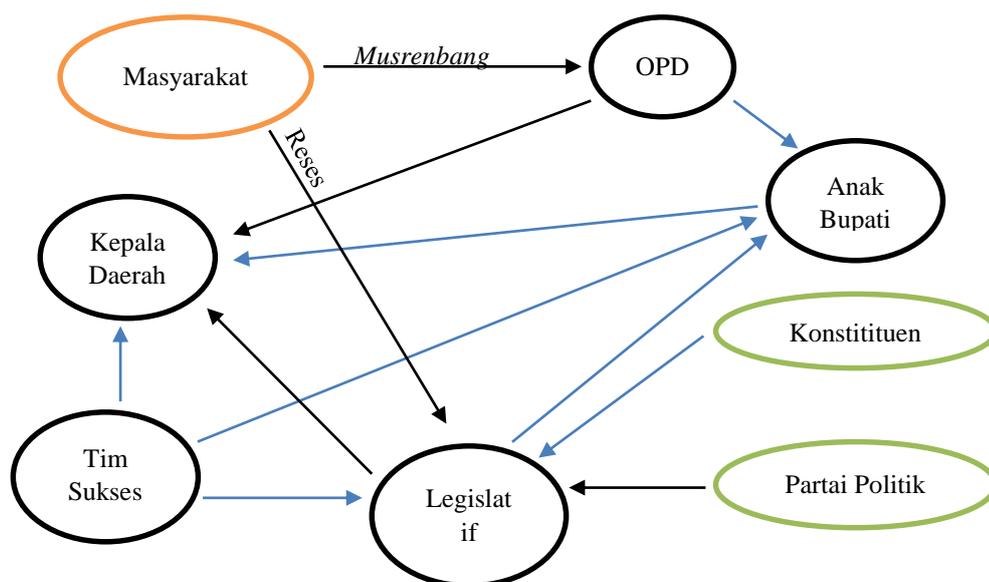
*Ketiga*, hubungan kelompok kepentingan terhadap lembaga legislatif terbentuk akibat hubungan silang antara kelompok kepentingan dengan kepala daerah. Kelompok kepentingan memanfaatkan relasi terhadap lembaga legislatif untuk melakukan komunikasi secara formal terhadap kepala daerah. Selain itu kepentingan yang masuk ke lembaga legislatif lebih bersifat titipan. Kelompok kepentingan ini memiliki dua peran yaitu sebagai tim sukses bupati dan konstituen bagi anggota legislatif.

*Keempat*, anggota legislatif juga punya kepentingan terhadap APBD baik relasi dalam bentuk formal maupun informal. Secara formal hubungan legislatif terhadap APBD yaitu melalui tim kelompok kerja diwakili oleh badan anggaran dan pada tahap pembahasan bersama terkait rancangan APBD antara eksekutif dengan legislatif. Sehingga pada tahap tersebut tawar menawar kepentingan terkait besarnya anggaran dan tambahan program kerja dari legislatif dapat disisipkan. Hubungan legislatif dengan

pemegang kekuasaan tertinggi lebih dinamis. Sedangkan relasi anggota legislatif terhadap OPD mengaku sebagai tim sukses dan orang dekat kepala daerah untuk lebih memperkuat posisinya dalam menyisipkan kepentingannya terhadap OPD terkait. Karena organisasi perangkat daerah bertanggung jawab kepada kepala daerah sehingga apapun perintah dari kepala daerah maka OPD harus menjalankannya.

*Kelima*, selain kepala daerah sebagai pemegang keputusan tertinggi terhadap APBD, anak bupati sebagai aktor yang memiliki peran penting dalam pengambilan keputusan terhadap anggaran daerah karena memiliki relasi terhadap kepala daerah dan bidang perencanaan anggaran daerah sebagai unsur eksekutif yang akan menginput masuk program kerja ke Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). SIPD adalah suatu sistem di bawah kementerian dalam negeri yang diinput oleh bidang perencanaan anggaran. Relasi yang terbentuk aktor individu dengan bidang perencanaan anggaran adalah sifatnya asimetris atau terjadi satu arah saja. Karena pada dasarnya relasi anak bupati ke aktor lain adalah karena kepentingan untuk meminta dan menitipkan program kerja terhadap APBD. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mencoba menggambarkan skema jaringan aktor dalam penyusunan APBD di kabupaten penelitian seperti pada gambar 1.

Gambar 1.  
*Jaringan Aktor dalam Penyusunan Anggaran Daerah*



*Sumber: Hasil Olah Data dan Analisis Penulis.*

Berdasarkan gambar 1 di atas dapat dipahami bahwa: (1) Aktor utama yang terlibat langsung dalam penyusunan anggaran daerah adalah kepala daerah, anggota legislatif, organisasi perangkat daerah, tim sukses dan anak bupati. Sedangkan masyarakat, partai politik dan konstituen anggota DPRD tidak berpengaruh langsung. (2) Kepala daerah menjadi aktor dominan dalam politik anggaran daerah, namun terdapat aktor informal yaitu anak bupati juga mempunyai pengaruh besar dalam pengambilan keputusan. (3) Terdapat dua jenis jaringan yang terbentuk yaitu jaringan formal dan jaringan informal. Jaringan formal adalah relasi yang sifat legal berdasarkan relasi kuasa yang dimiliki aktor. Sedangkan jaringan informal yaitu relasi yang sifat tertutup dan terjadi di balik jaringan formal. Pada gambar di atas garis hitam merupakan jaringan formal dan garis biru adalah jaringan informal. (4) Setiap aktor menciptakan hubungan silang antar aktor. (5) Menurut Barnes terdapat tiga sifat jaringan yaitu jaringan kepentingan, emosional dan kekuasaan.<sup>20</sup> Pada gambar 1 sifat jaringan kepentingan terjadi di semua relasi antar aktor. Sementara sifat jaringan emosional terbentuk di antara kepala daerah, anak bupati dan tim sukses. Sedangkan sifat jaringan kekuasaan terbentuk di semua aktor formal berdasarkan jabatan politik yang dimilikinya. (6) Masyarakat (*civil society*) dapat dikategorikan sebagai aktor informal, akan tetapi dalam penyusunan anggaran daerah di kabupaten penelitian peran masyarakat hanya melalui Musrenbang yang dilaksanakan oleh dinas terkait dan reses oleh setiap anggota DPRD.

Jika dianalisis menggunakan teori jaringan aktor dari Wellman, maka terdapat ikatan asimetris antara unsur-unsur dalam sistem jaringan sehingga terdistribusinya sumber daya berupa anggaran yang tidak merata. Terakomodasinya kepentingan dipengaruhi oleh kuat atau tidaknya hubungan antara aktor terhadap pemegang keputusan anggaran yaitu kepala daerah dan anak bupati. Kemudian Wellman melanjutkan bahwa distribusi yang timpang tersebut memotivasi bagi aktor untuk bekerja sama, sedangkan kelompok lain bersaing dan memperebutkannya. Jadi teori jaringan berkualitas dinamis dengan struktur sistem akan berubah bersamaan dengan terjadinya pergeseran pola koalisi dan konflik.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup>*Ibid.*

<sup>21</sup>Herzon Y, *Loc. Cit.*

Program kerja dalam APBD dapat menjadi kontestasi persaingan dan perebutan kepentingan antara aktor baik di internal jaringan kepala daerah maupun oposisi jaringan aktor lain. Aktor yang bekerja sama adalah hanya aktor yang memiliki relasi terhadap kepala daerah dan anak bupati. Indikator aktor sebagai bagian dari jaringan aktor pemegang kekuasaan anggaran daerah adalah terakomodasinya kepentingan aktor. Sedangkan kelompok yang bersaing adalah oposisi di luar jaringan aktor pemegang kekuasaan anggaran daerah.

### **Strategi Aktor dan Kepentingan Terhadap APBD**

Politik menyangkut proses penentuan tujuan dan cara melaksanakannya. Pelaksanaan tujuan itu perlu kebijakan yang menyangkut pengaturan, pembagian dan alokasi sumber daya. Sumber daya yang terbatas memerlukan strategi bagi aktor untuk mencapainya tujuan yang diinginkan. Strategi adalah cara atau taktik dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki sebagai kekuatan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Di kabupaten penelitian kepala daerah adalah pemegang kekuasaan tertinggi menjadi aktor paling penting dalam pengambilan keputusan dalam APBD. Selain bupati juga terdapat aktor informal yang memiliki kontrol besar dalam APBD. Syarat pertama untuk memasukan kepentingan terhadap APBD adalah relasi atau hubungan terhadap sistem jaringan aktor kepala daerah. Kepentingan yang dimaksud adalah program yang akan dijalankan oleh aktor maupun besar kecilnya anggaran yang didapatkan. APBD sebagai anggaran publik merupakan sumber daya terbatas, sementara banyaknya aktor dan besarnya kepentingan aktor lebih besar dari kemampuan APBD.

Komunikasi informal cenderung dipilih sebagai strategi politik bagi aktor. Selain komunikasi langsung antara aktor terdapat juga komunikasi silang, yaitu dengan cara menitipkan kepentingan terhadap aktor lain. Seperti menitipkan ke lembaga legislatif. Legislatif memiliki pengaruh besar secara formal dalam APBD pada tahap pembahasan antara eksekutif dengan legislatif. Sehingga berpengaruh terhadap jenis program kerja dan besarnya anggaran dapat diusulkan oleh anggota legislatif. Setelah aktor membentuk jaringan untuk memperkuat posisinya maka setiap aktor dalam memasukan dan mengawal kepentingannya terhadap anggaran daerah menggunakan komunikasi politik dengan dua pendekatan yaitu: *Pertama*, pendekatan persuasif

merupakan pilihan pertama dan utama dalam melakukan komunikasi dan lobi terhadap pemegang kekuasaan dalam hal ini bupati dan anak bupati sebagai aktor individu. Komunikasi ini selain melalui jalur formal juga cenderung melalui jalur informal. *Kedua*, pendekatan represif merupakan pilihan terakhir bagi aktor ketika kepentingannya menemui jalan buntu. Aktor yang tidak terakomodasi kepentingannya memobilisasi aktor lain yang kecewa untuk membentuk kekuatan baru. Salah satu fakta dilapangan menunjukkan pada kasus hak interpelasi legislatif terhadap eksekutif pada perubahan APBD tahun 2021.

Berdasarkan uraian di atas, penulis menggunakan kerangka strategi politik dari Roberts, Hsiao, Berman dan Reich untuk menganalisis perilaku aktor yang mempengaruhi proses perumusan kebijakan sebagai berikut:<sup>22</sup> *Pertama*, menjelaskan tentang posisi aktor yang melibatkan dengan melihat relasi aktor lain melalui lobi, negosiasi, atau tawar menawar kepentingan. Posisi ini berdasarkan tuntutan dan dukungan aktor terhadap kebijakan yang diinginkan. Posisi ini mengacu kepada dukungan atau penentangan seseorang terhadap kebijakan yang diminati. Proses penyusunan anggaran daerah di kabupaten penelitian para aktor berusaha mempengaruhi kebijakan berdasarkan tujuan dan kepentingan aktor. Kepala OPD memperjuangkan lembaganya untuk mendapatkan anggaran secara maksimal, legislatif sebagai wakil rakyat memperjuangkan konstituen daerah pemilihannya, dan tim sukses untuk menuntut balas budi dari kepala daerah terpilih.

*Kedua*, strategi kekuasaan memanfaatkan relasi kuasa aktor dengan menggunakan berbagai cara berdasarkan sumber daya yang dimiliki aktor. Strategi ini, aktor berusaha menggunakan kekuasaan agar dapat memengaruhi kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Bupati sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dari seluruh aktor yang terlibat dapat menggunakan kekuasaannya untuk mempengaruhi sebuah kebijakan. Selain dari kepala daerah terdapat juga aktor informal yang memiliki kekuasaan secara tidak langsung berdasarkan hubungan kekeluargaan dengan kepala daerah.

*Ketiga*, strategi pemain melihat aktor memobilisasi aktor lain yang memiliki kekuatan dalam mempengaruhi kebijakan. Biasanya aktor yang dimobilisasi adalah

---

<sup>22</sup>Marc Roberts, William Hsiao, Peter Berman & Michael Reich, *Loc.Cit.*

aktor yang kecewa akibat tidak terakomodasinya kepentingan terhadap kebijakan. Strategi ini dilakukan oleh aktor-aktor yang tidak berhasil terakomodasi kepentingannya dengan memainkan isu sebagai alat untuk memobilisasi massa. Seperti pada kasus pengusulan hak interpelasi beberapa anggota DPRD pada perubahan APBD tahun 2021.

*Keempat*, strategi persepsi menggunakan informasi untuk berusaha mengubah cara berpikir dan melihat suatu wacana untuk memetakan masalah dan solusinya. Strategi ini digunakan oleh eksekutif dan legislatif melalui musrenbang dan reses sebagai wadah dalam menyampaikan aspirasi, kritik, dan saran kemudian dikonversikan dalam bentuk program kerja. Sehingga para pemangku kebijakan dapat memahami esensi dari anggaran daerah untuk kesejahteraan rakyat.

## **Kesimpulan**

Kebijakan merupakan mekanisme politis, manajemen, finansial atau administratif untuk mencapai tujuan eksplisit. Salah satu produk dari politik anggaran sebagai kebijakan publik adalah APBD. Kebijakan publik tidak terlepas dari peran aktor-aktor. Hal ini disebut sebagai aktor politik karena merupakan pelaku atau orang yang terlibat langsung dalam sistem politik terkait pembuatan kebijakan publik. Penyusunan APBD sebagai politik anggaran tidak terlepas peran beberapa aktor formal dan aktor informal dengan membentuk jaringan dalam mengawal kepentingannya masing-masing.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dan analisis hasil penelitian menggunakan teori Wellman tentang jaringan aktor dapat ditarik kesimpulan bahwa aktor yang mendominasi atau memegang kekuasaan paling besar dalam pengambilan keputusan terhadap anggaran daerah adalah kepala daerah dan anak bupati. Penyusunan anggaran daerah membuat aktor membentuk jaringan sebagai akses untuk mencapai tujuan aktor yaitu kepentingan. Unsur-unsur jaringan aktor penyusunan APBD adalah aktor formal terdiri atas kepala daerah, lembaga legislatif dan OPD. Sedangkan aktor informal yaitu anak bupati (aktor individu) dan kelompok kepentingan (tim sukses). Kemudian aktor akan selalu berusaha untuk memperkuat jaringannya terhadap pemegang kekuasaan tertinggi APBD.

Strategi aktor dalam memasukan dan mengawal kepentingannya terhadap APBD, pertama harus memiliki modal relasi sebagai syarat utama. Langkah selanjutnya yang dilakukan aktor tersebut adalah komunikasi secara formal dan informal, namun

aktor cenderung melakukan komunikasi informal dan menitipkan kepentingannya kepada aktor lain. Selain itu komunikasi politik yang digunakan oleh aktor dalam memasukan dan mengawal kepentingannya terhadap pemegang keputusan anggaran daerah menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan persuasif dan represif. Pendekatan persuasif merupakan pilihan pertama dan utama dalam melakukan komunikasi terhadap pemegang kekuasaan dalam hal ini bupati dan aktor sentral. Sedangkan tindakan represif merupakan pilihan terakhir bagi aktor ketika kepentingannya menemui jalan buntu. Selain itu terdapat kerangka strategi politik untuk mengamati perilaku aktor yang berusaha mempengaruhi proses perumusan kebijakan anggaran daerah yaitu strategi posisi, strategi kekuasaan, strategi pemain dan strategi persepsi.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Creswell, John W. *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Danastri, Ningrum & Agus Machfud Fauzi, “Jaringan Sosial Pengusaha Tionghoa di Kota Surabaya” dalam *Paradigma*, Vol. 10, No. 1 (2021), h. 1-20.
- Denhardt, Robert B. & Janet V. Denhardt, *Public Administration: An Action Orientation*, 6<sup>th</sup> Ed. USA: Thomson Wadsworth, 2009.
- Fauzi, Achmad Nur & Dewi Rostyaningsih. “Analisis Peran Aktor Dalam Formulasi Kebijakan Semarang *Smart City*” dalam *Journal Of Public Policy And Management Review*, Vol. 7, No. 4 (2018), h. 1-18.
- Hanida, Rozidateno Putri. “Dinamika Penyusunan Anggaran Daerah: Kasus Proses Penetapan Program Dan Alokasi Anggaran Belanja Daerah Di Kabupaten Sleman” dalam *Jurnal Penelitian Politik*, Vol 7, No 1 (2010), h. 74.
- Herzon Y. “Politik Anggaran: Studi Tentang Proses Perumusan Kebijakan Anggaran Belanja Langsung SKPD dalam Penyusunan APBD Tahun 2011 Di Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi”. *Tesis*. Yogyakarta: Magister Administrasi Publik, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2011.
- Maulana, Delly. “Konflik dan System Nilai dalam Proses Penyusunan Kebijakan Anggaran Pendapatan dan belanja daerah (APBD) di Pemerintahan Daerah Provinsi Banten” dalam *Journal of Indonesia Public Administration and Governance Studie (JIPAGS)*, Vol. 4, No. 1 (2020), h. 707-719.

- Norton, Andy & Diane Elson. *What's Behind The Budget?: Politics, Right and Accountability In The Budget Process*. London, UK: Overseas Development Institute, 2002.
- Pratikno. "Peningkatan Kapasitas Berjejaring Dalam Tata Pemerintahan Yang Demokratis" dalam Wahyudi Kumorotomo & Ambar Widaningrum (ed.). *Reformasi Aparatur Negara Ditinjau Kembali*. Yogyakarta: Gava Media, 2010.
- Pritasari, Luqyana Amanta & Bevaola Kusumasari. "Intervensi Aktor Dalam Mempengaruhi Formulasi Kebijakan Lingkungan: Studi Kasus Kebijakan Relokasi Tambak Udang Di Yogyakarta" dalam *Jurnal Borneo Administrator*, Vol. 15, No. 2 (2019), h. 179-198.
- Roberts, Marc, William Hsiao, Peter Berman & Michael Reich. *Getting Health Reform Right*. Oxford: Oxford University Press, 2002.
- Rubin, Irene S. *The Politics Of Public Budgeting: Getting And Spending, Borrowing and Balancing*. Chatham: Chatham House, 2006.
- Saunders, Benjamin, Jenny Kitzinger & Celia Kitzinger. "Anonymising Interview Data: Challenges And Compromise In Practice" dalam *Qualitative Research*, Vol. 15, No. 5 (2015), h 616-632.
- Suwitri, Sri. "Jejaring Kebijakan Dalam Perumusan Kebijakan Publik (Suatu Kajian Tentang Perumusan Kebijakan Penanggulangan Banjir dan Rob Pemerintah Kota Semarang)" dalam *Jurnal Delegasi STIA Banjarmasin*, Vol. 6 No. 3 (2008), h.1-32.
- Taufik. "Studi Jaringan Aktor dalam Perumusan Kebijakan Publik" dalam *AL-IJTIMA'I-International Journal of Government and Social Science*, Vol. 2, No. 2, (2017), h. 219-234.